

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2008)
- Ali, Mahrus. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press, 2013
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Keempat. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995)
- , *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 1996
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet. 2006
- Hadjon, P. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1985
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hestu Cipto Handoyo, B. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Andi Offset, 2003
- Jan Rimmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Juhaya S. Praja, H. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Bandung, 2011.
- Kasim (Editor), Ifdhal. *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Penerbit Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni, 2006.
- Loppa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

- M. Syafi'ie & Nova Umiyati (Editor), *To Fullfill & To Protect : Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012
- Mansyhur Effendi, A. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mertus, Julie. et. al., *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah demi langkah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Keempat. Bandung: Alumni, 2010
- Najih, Mokhamamad. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*. Cetakan Pertama. Malang: In-Trans Publishing, 2008
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Purbopranoto, Mr. Kuntjoro, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sholehudin, Umar. *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2011.
- Smith, Rhona K.M. et. al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kelima Belas (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cetakan KeDua Puluh Dua. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986

Data Elektronik

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, "Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan," Akses 2 Februari 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/publik/14/09/03/nbbcs77-icw-747-persen-koruptor-dihukum-ringan>, "ICW: 74,7 Koruptor Dihukum Ringan," Akses 31 Agustus 2015

Perundang-undangan

- Tim Redaksi Citra Umbara. Piagam Jakarta Undang-Undang Dasar 45, Bandung: Citra Umbara, 2002.
- Moeljatno. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cetakan KeDua Puluh Satu. Jakarta : Bumi Aksara: 2001
- Tim Redaksi Media Center. Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No. 26 Th 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No. 39 Th 1999. Surabaya: Media Center, 2007.
- Redaksi Sinar Grafika. Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : UU RI No. 46 Th. 2009. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Annex, UN Doc E / CN.4 / 1984/4 (1984).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi & Suap Disertai Undang-Undang Tentang Pencucian Uang, Cetakan Pertama Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Makalah

- Palupi, Sri. *Mengenal Dan Memahami Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Makalah disajikan pada Pelatihan Dasar HAM Dosen Se-Indonesia, Diselenggarakan PUSHAM UII, Yogyakarta 26-30 September 2011

1. Menurut bapak/ibu apakah penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi melanggar HAM ?
2. Apakah ada justifikasinya dari sudut pandang HAM ?
3. Menurut bapak/ibu apakah penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi melanggar DUHAM ?
4. Atau melanggar Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil Sosial dan Politik/UUD 1945/Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ?
5. Apa saja dasar yuridis dari peraturan-peraturan HAM mengenai pencabutan hak politik terpidana korupsi ?

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap proses penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi yang saat ini berjalan ?
2. Mengapa pengungkapan kasus korupsi sepertinya sangat sulit dilakukan ?
3. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan strategi dasar penanggulangan tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan para penegak hukum ?
4. Apakah bapak optimis pemberantasan korupsi bisa dilakukan di negara kita?
5. Menurut bapak hukuman apa yang cocok diberikan kepada para koruptor supaya dapat menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun calon koruptor supaya mengurungkan niatnya ?
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi ?
7. Apakah ada justifikasinya dari sudut pandang hukum pidana ?
8. Menurut bapak, siapa saja terdakwa kasus korupsi (kriteria terdakwa) yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tertentu ?
9. Kapan pidana tambahan pencabutan hak politik dapat diterapkan kepada terpidana korupsi ?
10. Menurut bapak apakah penerapan pidana pencabutan hak politik terpidana korupsi efektif dapat menjadi efek penjeraan terhadap para koruptor ?